



KETETAPAN

Nomor 17/TAP.MK/PT/01/2021

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Permohonan yang diajukan oleh Hj. ANANDA dan H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada AURA AKHMAN,S.H.,M.H. dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Januari 2021 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dari IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 2 yang diwakili oleh RIZALDI NAZARUDDIN, SH, MH dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Januari 2021;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Panel Hakim pada tanggal 26 Januari 2021 telah menetapkan IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menerima IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

Ketua Panel Hakim,

Aswanto

